

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun ekonominya adalah masalah ketenagakerjaan. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran karena banyaknya bidang usaha yang mengalami pailit. Di samping itu juga masih rendahnya tingkat kualitas dan produktivitas kerja. Dengan melihat kondisi di atas maka pembangunan ketenagakerjaan mempunyai tujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha, sehingga setiap angkatan kerja memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Suparman, 2022: 4).

Selama ini perempuan seringkali disudutkan peranannya baik dalam rumah tangga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara. Perempuan selalu dikaitkan dengan mengurus rumah tangga, anak, dan suami. Perbedaan fisik dan psikis antara laki-laki dan perempuan menimbulkan perbedaan fungsi antara keduanya. Perempuan memiliki fungsi keibuan sebab ia melahirkan anak, sehingga menimbulkan konsekuensi untuk merawat, mengasuh, menyusui, dan memberikan kasih sayang. Sementara itu, laki-laki berfungsi sebagai pencari nafkah dikarenakan mempunyai kondisi fisik yang kuat. Pembagian fungsi tersebut pada akhirnya menumbuhkan pembagian kerja secara generalisasi. Yang paling menonjol adalah ditematkannya perempuan dalam pekerjaan domestik dan ia bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Sedangkan laki-laki

ditempatkan pada ranah publik sebagai pencari nafkah utama. Peran perempuan sebagai ibu menjadikan kerja yang dilakukannya tidak tampak dan tidak direkam secara statistik.

Padahal perempuan dapat memberikan sumbangan penting dalam pembangunan melalui kesetaraan gender. *World Bank* dalam buku *Engendering Development* menyebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan persoalan pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Peran langsung perempuan dalam pembangunan diwujudkan secara nyata melalui bekerja, di mana bekerja merupakan gambaran peran yang mudah dilihat dan dianalisis. Perempuan lebih banyak terlibat dalam pekerjaan yang tidak membawa upah atau tidak dilakukan di luar rumah, itulah mengapa kerja perempuan seringkali tidak terlihat (Krishna Adnyani, 2020: 4).

Keterlibatan perempuan yang mayoritas dalam pekerjaan domestik dapat dilihat melalui tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. ILO (International Labour Organization) merumuskan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) atau *labour force participation rate* (LFPR) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang bergerak aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan terhadap populasi penduduk usia kerja. TPAK menghitung jumlah orang dalam angkatan kerja sebagai persentase dari penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah jumlah dari orang yang bekerja dan tidak bekerja; sedangkan populasi penduduk usia kerja adalah penduduk di atas

usia kerja legal biasanya 15 tahun ke atas (Mohammad, 2021: 14). Berikut ini Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi**  
**Tahun 2009-2022**

Tahun	TPAK (Jiwa)	TPAK Perempuan (Jiwa)	TPAK Laki-Laki (Jiwa)	Rasio (%)	
				TPAK Perempuan (Persentase)	TPAK Laki-Laki (Persentase)
2009	1.334.496	442.937	891.559	48,10	84,48
2010	1.545.683	496.774	1.048.909	46,37	84,47
2011	1.495.167	493.505	1.001.662	47,33	87,19
2012	1.472.920	473.947	998.973	44,72	84,59
2013	1.452.832	441.216	1.011.616	41,55	82,92
2014	1.570.822	506.998	1.063.824	46,46	83,85
2015	1.620.752	532.192	1.088.560	46,77	84,65
2016	1.692.193	569.801	1.122.392	48,60	85,65
2017	1.724.633	597.576	1.127.057	50,28	84,00
2018	1.790.437	633.183	1.127.254	50,28	84,00
2019	1.765.742	583.484	1.182.258	47,03	84,34
2020	1.832.993	623.122	1.209.871	50,04	84,96
2021	1.840.594	629.416	1.211.178	49,89	83,91
2022	1.884.278	636.502	1.247.776	48,97	86,17

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2023.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Jambi tahun 2009-2022 mengalami fluktuasi cenderung menurun dimana Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tertinggi berada di tahun 2009 sebesar 636.502 dan terendah berada di tahun 2018 sebesar 441.216.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja perempuan dalam dunia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan

angkatan kerja perempuan untuk mendapatkan pekerjaan. Angka Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja perempuan.

Di Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah geografis di Indonesia dimana Provinsi Jambi juga terdapat Tenaga Kerja Perempuan dan sebagai kepala rumah tangga dalam arti suami meninggal atau suami tidak dapat menafkahi.

Berikut ini Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan berkerja dan sebagai kepala rumah tangga di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Yang Berkerja Dan**  
**Sebagai Kepala Rumah Tangga Dipertanian & Perdesaan Di Provinsi Jambi**  
**Tahun 2009-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kepala RT (Jiwa)</b>	<b>Pr Sebagai Kepala RT Berkerja (Jiwa)</b>	<b>Pr Sebagai Kepala Rumah Tangga (Jiwa)</b>	<b>Pr Sebagai Kepala RT Berkerja (Persentase)</b>
2009	1.438.915	97.551	147.135	66,30
2010	1.573.303	107.545	168.645	63,77
2011	1.613.988	107.336	175.156	61,28
2012	1.647.839	108.661	170.368	63,78
2013	1.684.775	116.758	190.036	61,44
2014	1.698.727	121.096	190.134	63,69
2015	1.728.323	115.824	183.760	63,03
2016	1.757.115	113.647	186.001	61,10
2017	1.785.574	114.441	187.485	61,04
2018	1.812.943	125.318	203.571	61,56
2019	1.840.254	128.114	208.825	61,35
2020	1.801.420	125.109	208.064	60,13
2021	1.819.736	114.383	191.950	59,59
2022	1.842.489	107.500	179.256	59,97

*Sumber: BPS Provinsi Jambi 2023*

Berdasarkan pada tabel 1.2 persentase jumlah rumah tangga yang bekerja dan sebagai kepala rumah tangga berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Jambi,

dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah perempuan yang bekerja adalah sebesar 63,13%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa persentase perempuan bekerja sebagai kepala rumah tangga pun masih tergolong cukup tinggi.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja salah satunya adalah upaya meningkatkan Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang dimana sangat diharapkan untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan, yang dipertegas dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang APBN dimana untuk mengupayakan sasaran penuh untuk Pertumbuhan ekonomi, yang mengatakan Pertumbuhan ekonomi setiap 1% bisa menyerap 400.000 tenaga kerja, dan berarti jika Pertumbuhan ekonomi meningkat maka lapangan pekerjaan akan terbuka luas dan membuat penyerapan tenaga kerja semakin banyak.

Berikut adalah tabel Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi Tahun 2009-2022.

**Tabel 1.3**  
**Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2022**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persentase (%)
2009	6,37	-
2010	7,31	14,76
2011	7,86	7,52
2012	7,83	-0,38
2013	7,35	-6,13
2014	7,77	5,71
2015	7,80	0,39
2016	7,86	0,77
2017	7,57	-3,69
2018	6,81	-10,04
2019	6,71	-1,47
2020	-0,66	-10,98
2021	7,07	9,71
2022	8,99	27,16
<b>Rata-Rata</b>	<b>7,68</b>	<b>2,38</b>

Sumber: BPS Jambi Dalam Angka 2023.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi dari tahun 2009-2022 mengalami fluktuasi cenderung meningkat dengan total rata-rata 2,38%. Dimana pertumbuhan ekonomi yang tertinggi berada pada tahun 2022 yaitu sebesar 8,99 dan yang terendah berada pada tahun 2020 yaitu sebesar -0,66, penurunan yang sangat drastis tersebut terjadi karena adanya Covid-19 yang menyebabkan penurunan kinerja para penduduk ekonomi daerah.

Tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja yang akan berpengaruh terhadap Tingkat partisipasi angkatan kerja. Selain pertumbuhan ekonomi, Salah satu masalah yang sering terjadi pada tenaga kerja adalah tingginya rendahnya upah yang didapat untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup yang meningkat seiring berjalannya waktu. Kebutuhan hidup yang meningkat, tetapi upah yang didapat sama atau rendah menjadi salah satu pendorong gerakan para pekerja. Hal ini adalah alasan yang membuat tingkat upah diperbaharui setiap tahun.

Upah merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas menjadi lebih optimal merupakan sistem pengupahan dalam perusahaan. Upah yang diterima oleh para tenaga kerja tergantung pada jumlah tingkat produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri. Data yang mengenai kenaikan upah diberbagai negara, terutama negara maju maupun negara berkembang menunjukkan bahwa para pekerja berkaitan erat antara kenaikan upah dengan kenaikan produktivitas. Faktor tingkat upah dapat mempengaruhi orang untuk masuk atau tidaknya dalam pasar tenaga kerja. Dimana jika tingkat upah tinggi maka makin banyak masyarakat akan

masuk kedalam pasar tenaga kerja, hal tersebut otomatis akan mengakibatkan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (Wiryawan, 2020: 10).

Upah minimum didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap. Penetapannya merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja, diarahkan agar penentuan besarnya mengacu kepada terpenuhinya kebutuhan hidup minimum (KHM). Ini sesuai dengan standar internasional bahwa upah minimum yang ditetapkan harus mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum. Berdasarkan hal tersebut tingkat upah tidak terlepas dari penelitian ini yang mana tingkat upah juga dapat mempengaruhi orang untuk masuk atau tidak ke pasar tenaga kerja, dimana jika tingkat upah tinggi maka makin banyak masyarakat akan masuk kedalam pasar tenaga kerja, otomatis diharapkan juga dapat meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja (Putra, Wiridin & Wajdi, 2022: 16).

Upah minimum provinsi mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tenaga kerja dilihat dari perbedaan jenis kelamin. Para peneliti menemukan bahwa kenaikan upah minimum memiliki dampak yang lebih besar pada upah perempuan, karena perempuan umumnya dibayar lebih kecil dari laki-laki (Sanyata, 2017:77). Berikut perkembangan tingkat upah minimum di Provinsi Jambi tahun 2009-2022 dapat dilihat pada tabel 1.4



**Tabel 1.4**  
**Upah Minimum Provinsi Jambi**  
**Tahun 2009 -2022**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai ( Rp )</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2009	800.000	-
2010	900.000	12,5
2011	1.028.000	14,22
2012	1.142.500	11,14
2013	1.300.000	13,79
2014	1.502.230	15,56
2015	1.710.000	13,83
2016	1.906.650	11,5
2017	2.063.948	8,25
2018	2.243.718	8,71
2019	2.423.889	8,03
2020	2.630.162	8,51
2021	2.630.162	0
2022	2.698.940	2,61

*Sumber : BPS Jambi Dalam Angka, 2023.*

Dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa upah minimum di Provinsi Jambi mengalami peningkatan di setiap tahunnya, penetapan tingkat upah minimum tersebut merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup pekerjanya. Akan tetapi kenaikan tingkat upah tersebut tidak diikuti dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan.

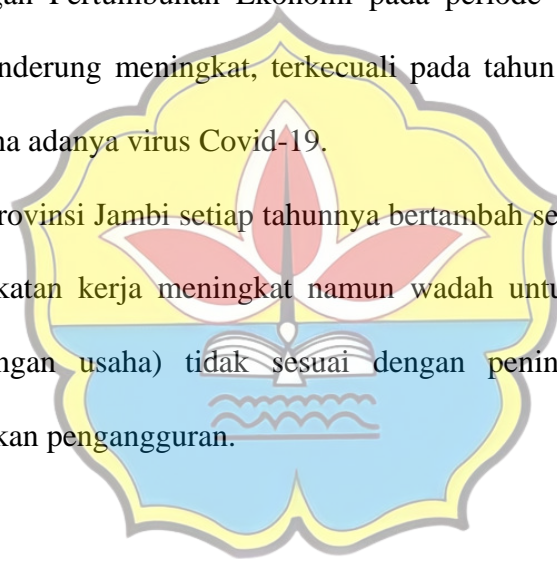
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, sehingga dilakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga Yang Bekerja Di Provinsi Jambi”**.



## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menyimpulkan beberapa identifikasi masalah yaitu :

1. Berdasarkan persentase dari 2009-2022 terus meningkatnya perempuan bekerja dan juga sebagai kepala rumah tangga demi membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Upah minimum Provinsi Jambi setiap tahun meningkat tetapi peningkatannya tidak terlalu signifikan.
3. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi pada periode 2009-2022 mengalami fluktuasi cenderung meningkat, terkecuali pada tahun 2020 sangat menurun drastis karena adanya virus Covid-19.
4. Penduduk provinsi Jambi setiap tahunnya bertambah sehingga secara otomatis jumlah angkatan kerja meningkat namun wadah untuk menaungi angkatan kerja (lapangan usaha) tidak sesuai dengan peningkatan tersebut yang mengakibatkan pengangguran.



## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah peneliti dapat menemukan masalah sebagai berikut :

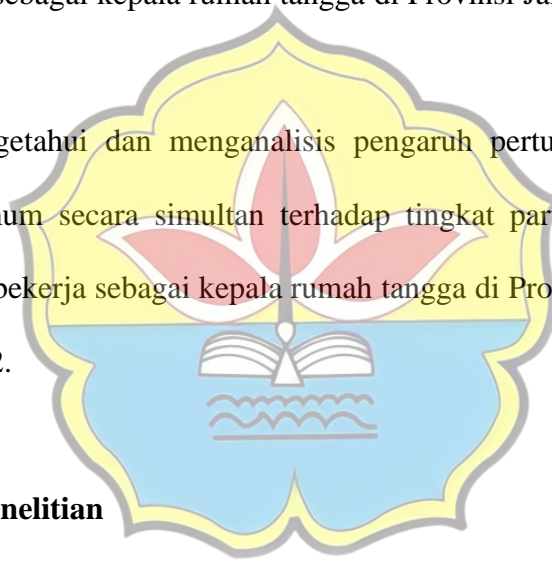
1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara parsial terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebagai kepala rumah tangga di Provinsi Jambi tahun 2009 sampai 2022 ?

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara simultan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebagai kepala rumah tangga di Provinsi Jambi tahun 2009 sampai 2022 ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara parsial terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebagai kepala rumah tangga di Provinsi Jambi tahun 2009 sampai 2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara simultan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan bekerja sebagai kepala rumah tangga di Provinsi Jambi tahun 2009 sampai 2022.



#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

- a. Teoretis

Diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada penelitian ini mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di provinsi Jambi.

b. Praktis

Memberikan informasi dan pengembangan terbaru tentang permasalahan yang terjadi dan dapat digunakan sebagai rencana kebijakan dalam mengurangi tingkat kemiskinan salah satunya adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui partisipasi angkatan kerja pada wanita dengan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dari penganggaran yang efektif untuk kesetaraan gender sehingga tercapainya kualitas sumber daya manusia yang memadai.



